

BAB IV

DIVERSITAS PENDIDIKAN ISLAM MULTIKULTURAL

PERSPEKTIF NUR SYAM

A. Tantangan Radikalisme dan Lemahnya Konstitusi Negara

Dalam pandangan Nur Syam, multikulturalisme adalah seperangkat ide atau gagasan yang menghasilkan aliran yang berpandangan bahwa terdapat variasi budaya di dalam kehidupan masyarakat. Yang terjadi adalah adanya kesetaraan budaya, sehingga antara satu entitas budaya dengan budaya lainnya tidaklah berada di dalam suasana bertanding untuk memenangkan pertarungan.¹⁰¹

Secara etimologis multikulturalisme dibentuk dari kata multi (banyak), kultur (budaya), dan isme (aliran/paham). Dengan demikian multikulturalisme dapat diartikan sebagai sebuah paham yang mengakui adanya banyak kultur. Secara hakiki, dalam kata itu terkandung pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaannya masing-masing yang unik.¹⁰²

Secara sederhana multikulturalisme adalah sebuah paham yang membenarkan dan meyakini adanya relativisme kultur disebabkan adanya keragaman budaya, keragaman suku dengan kebudayaan khasnya. Sehingga

¹⁰¹ Nur Syam, *Tantangan...*, 79.

¹⁰² Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 75.

dasar kemunculan multikulturalisme bermuara pada studi atas kebudayaan. Dari doktrin tersebut diharapkan akan munculnya semangat penghargaan terhadap perbedaan budaya dan selanjutnya melahirkan perilaku toleransi dalam kehidupan di tengah keanekaragaman budaya.

Semua orang tahu, manusia lahir ke dunia dengan potensi-potensi yang dimilikinya dan dalam keadaan seperti kertas putih.¹⁰³ Selanjutnya, interaksi sosial-kebudayaan merangsang potensi-potensi manusia dan menciptakannya sebagai sosok yang sesuai dengan lingkungan sekitar dimana ia hidup dan tinggal.

Sebagai sebuah ide, pendidikan multikultural dibahas dan diwacanakan pertama kali di Amerika dan negara-negara Eropa Barat pada tahun 1960-an oleh gerakan yang menuntut diperhatikannya hak-hak sipil (civil right movement). Tujuan utama dari gerakan ini adalah untuk mengurangi praktik diskriminasi di tempat-tempat publik, di rumah, di tempat-tempat kerja, dan di lembaga-lembaga pendidikan, yang dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Selama itu, di Amerika dan negara-negara Eropa Barat hanya dikenal adanya satu kebudayaan, yaitu kebudayaan kulit putih yang Kristen. Golongan-golongan lainnya yang ada dalam masyarakat-masyarakat tersebut dikelompokkan sebagai minoritas dengan pembatasan hak-

¹⁰³ Yassir Yasanius, *PELBBA 18*, cet.1, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2007), 235.

hak mereka (Pardi Suparlan, 2002: 2-3). Gerakan hak-hak sipil ini, menurut James A. Bank (1989: 4-5), berimplikasi pada dunia pendidikan, dengan munculnya beberapa tuntutan untuk melakukan reformasi kurikulum pendidikan yang sarat dengan diskriminasi. Pada awal tahun 1970-an muncullah sejumlah kursus dan program pendidikan yang menekankan pada aspek-aspek yang berhubungan dengan etnik dan keragaman budaya (cultural diversity).

Pendidikan Islam multikultur berorientasi pada lahirnya output pendidikan yang mampu menghargai perbedaan, menerima kemajemukan, dan membangun solidaritas dan integritas yang berasas pada keragaman.

Alasan lain yang melatarbelakangi adanya pendidikan multikultural adalah keberadaan masyarakat dengan individu-individu yang beragam latar belakang bahasa dan kebangsaan (nationality), suku (race or ethnicity), agama (religion), gender, dan kelas sosial (social class). Keragaman latar belakang individu dalam masyarakat tersebut berimplikasi pada keragaman latar belakang peserta didik dalam suatu lembaga pendidikan (James A. Bank, 1989: 14). Dalam konteks Indonesia, peserta didik di berbagai lembaga pendidikan diasumsikan juga terdiri dari peserta didik yang memiliki beragam latar belakang agama, etnik, bahasa, dan budaya. Asumsi ini dibangun berdasarkan pada data bahwa di Indonesia terdapat 250 kelompok suku, 250 lebih bahasa lokal (lingua franca), 13.000 pulau, dan 5 agama resmi (Leo Suryadinata, dkk., 2003: 30, 71, 104, dan 179). Paling tidak keragaman latar belakang siswa

di lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia terdapat pada paham keagamaan, afiliasi politik, tingkat sosial ekonomi, adat istiadat, jenis kelamin, dan asal daerahnya (perkotaan atau pedesaan).

Hal lain yang melatarbelakangi adanya pendidikan multikultural adalah adanya 3 (tiga) teori sosial yang dapat menjelaskan hubungan antar individu dalam masyarakat dengan beragam latar belakang agama, etnik, bahasa, dan budaya. Menurut Ricardo L. Garcia (1982: 37-42) ketiga teori sosial tersebut adalah: (1) *Melting Pot I: Anglo Conformity*, (2) *Melting Pot II: Ethnic Synthesis*, dan (3) *Cultural Pluralism: Mosaic Analogy*. Ketiga teori tersebut populer dengan sebutan teori masyarakat majmuk (*communal theory*).

Teori pertama, *Melting Pot I: Anglo Conformity*, berpandangan bahwa masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang beragam latar belakang—seperti agama, etnik, bahasa, dan budaya—harus disatukan ke dalam satu wadah yang paling dominan. Teori ini melihat individu dalam masyarakat secara hirarkis, yaitu kelompok mayoritas dan minoritas. Bila mayoritas individu dalam suatu masyarakat adalah pemeluk agama Islam, maka individu lain yang memeluk agama non-Islam harus melebur ke dalam Islam. Bila yang mendominasi suatu masyarakat adalah individu yang beretnik Jawa, maka individu lain yang beretnik non-Jawa harus mencair ke dalam etnik Jawa, dan demikian seterusnya. Teori ini hanya memberikan peluang kepada kelompok mayoritas untuk menunjukkan identitasnya. Sebaliknya, kelompok minoritas sama sekali tidak memperoleh hak untuk mengekspresikan identitasnya.

Identitas di sini bisa berupa agama, etnik, bahasa, dan budaya. Teori ini tampak sangat tidak demokratis.

Karena teori pertama tidak demokratis, maka muncullah teori kedua, yaitu *Melting Pot II: Ethnic Synthesis*. Teori yang dipopulerkan oleh Israel Zangwill ini memandang bahwa individu-individu dalam suatu masyarakat yang beragam latar belakangnya, disatukan ke dalam satu wadah, dan selanjutnya membentuk wadah baru, dengan memasukkan sebagian unsur budaya yang dimiliki oleh masing-masing individu dalam masyarakat tersebut. Identitas agama, etnik, bahasa, dan budaya asli para anggotanya melebur menjadi identitas yang baru, sehingga identitas lamanya menjadi hilang. Bila dalam suatu masyarakat terdapat individu-individu yang beretnik Jawa, Sunda, dan Batak, misalnya, maka identitas asli dari ketiga etnik tersebut menjadi hilang, selanjutnya membentuk identitas baru. Islam Jawa di kraton dan masyarakat sekitarnya yang merupakan perpaduan antara nilai-nilai Islam dan nilai-nilai kejawaan adalah salah satu contohnya. Teori ini belum sepenuhnya demokratis, karena hanya mengambil sebagian unsur budaya asli individu dalam masyarakat, dan membuang sebagian unsur budaya yang lain.

Mengingat teori kedua belum sepenuhnya demokratis, maka muncullah teori ketiga, yaitu *Cultural Pluralism: Mosaic Analogy*. Teori yang dikembangkan oleh Berkson ini berpandangan bahwa masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang beragam latar belakang agama, etnik, bahasa, dan budaya, memiliki hak untuk mengekspresikan identitas budayanya secara

demokratis. Teori ini sama sekali tidak meminggirkan identitas budaya tertentu, termasuk identitas budaya kelompok minoritas sekalipun. Bila dalam suatu masyarakat terdapat individu pemeluk agama Islam, Katholik, Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu, maka semua pemeluk agama diberi peluang untuk mengekspresikan identitas keagamaannya masing-masing. Bila individu dalam suatu masyarakat berlatar belakang budaya Jawa, Madura, Betawi, dan Ambon, misalnya, maka masing-masing individu berhak menunjukkan identitas budayanya, bahkan diizinkan untuk mengembangkannya. Masyarakat yang menganut teori ini, terdiri dari individu yang sangat pluralistik, sehingga masing-masing identitas individu dan kelompok dapat hidup dan membentuk mosaik yang indah.

Dari ketiga teori komunal di atas, teori ketigalah yang dijadikan dasar oleh pendidikan multikultural, yaitu teori Cultural Pluralism: Mosaic Analogy. Untuk konteks Indoneisa, teori ini sejalan dengan semboyan negara Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Secara normatif, semboyan tersebut memberi peluang kepada semua bangsa Indonesia untuk mengekspresikan identitas bahasa, etnik, budaya, dan agama masing-masing, dan bahkan diizinkan untuk mengembangkannya. Dari ketiga teori komunal di atas, teori ketigalah yang dijadikan dasar oleh pendidikan multikultural, yaitu teori Cultural Pluralism: Mosaic Analogy. Untuk konteks Indoneisa, teori ini sejalan dengan semboyan negara Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Secara normatif, semboyan tersebut memberi peluang kepada semua bangsa Indonesia untuk mengekspresikan

identitas bahasa, etnik, budaya, dan agama masing-masing, dan bahkan diizinkan untuk mengembangkannya.

Lebih jauh, menurut Jose A. Cardinas (1975: 131), pentingnya pendidikan multikultural ini didasarkan pada lima pertimbangan: (1) incompatibility (ketidakmampuan hidup secara harmoni), (2) other languages acquisition (tuntutan bahasa lain), (3) cultural pluralism (keragaman kebudayaan), (4) development of positive self-image (pengembangan citra diri yang positif), dan (5) equality of educational opportunity (kesetaraan memperoleh kesempatan pendidikan). Di pihak lain, Donna M. Gollnick (1983: 29) menyebutkan bahwa pentingnya pendidikan multikultural dilatarbelakangi oleh beberapa asumsi: (1) bahwa setiap budaya dapat berinteraksi dengan budaya lain yang berbeda, dan bahkan dapat saling memberikan kontribusi; (2) keragaman budaya dan interaksinya merupakan inti dari masyarakat Amerika dewasa ini; (3) keadilan sosial dan kesempatan yang setara bagi semua orang merupakan hak bagi semua warga negara; (4) distribusi kekuasaan dapat dibagi secara sama kepada semua kelompok etnik; (5) sistem pendidikan memberikan fungsi kritis terhadap kebutuhan kerangka sikap dan nilai demi kelangsungan masyarakat demokratis; serta (6) para guru dan para praktisi pendidikan dapat mengasumsikan sebuah peran kepemimpinan dalam mewujudkan lingkungan yang mendukung pendidikan multikultural.

Konsep hubungan negara dan agama dalam perspektif pemikiran para ahli sekurang-kurangnya terbagi dalam tiga tipologi, yang saling

berseberangan. Teoritisi yang beranggapan bahwa hubungan antara negara dan agama bersifat *integrated* agaknya tak memberikan peluang bagi ideologi kenegaraan lain selain agama itu sendiri. Paslanya, dia beranggapan bahwa agama adalah wahyu Tuhan yang telah mengatur segalanya, termasuk urusan kenegaraan. Model pemerintahan Iran merupakan contoh yang representatif. Sedangkan pandangan sekuler menyatakan bahwa hubungan antara negara dan agama terpisah. Hatta, negara mengurus urusan kenegaraan dalam berbagai dimensinya, sedangkan agama mengurus urusan agama saja. Keinginan pemerintah Belanda pada masa penjajahan dengan melokalisasi agama seputar persoalan di masjid atau surau merupakan penerapan gagasan sekularis. Sepertinya yang memberi peluang bagi pengembangan gagasan menempatkan keduanya dalam kehidupan bernegara-bangsa ialah pandangan teoritis bahwa negara dan agama bersifat simbiotik atau saling membutuhkan. Namun demikian di tengah arus pemikiran politik simbiotik, seperti di Indonesia, ternyata perbincangan mengenai penempatan Islam dan Pancasila dalam peta kenegaraan juga sering simpang siur.

Salah satu tantangan demokrasi adalah meningkatnya gerakan *civil society*. Yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat tentang demokrasi, kesadaran hukum, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Tanpa tiga pilar ini maka *civil society* yang dicita-citakan sebagai bagian penting dari Orde Reformasi hanyalah isapan jempol belaka. *Civil society* bukan hanya didiskusikan panjang lebar, akan tetapi butuh tindakan praksis. Ia bukan hanya

mengawang di angkasa, tetapi harus mendarah daging atau bergelut dengan tanah dan air.

Islam garis keras yang dilabeli dengan radikalisme Islam adalah sebuah konstruksi sosial. Sebagai sebuah konstruksi sosial, maka yang disebut sebagai radikalisme juga sangat tergantung kepada siapa yang mendefinisikannya. Di dalam hal ini, konsepsi radikalisme sangat tergantung kepada subyek yang melabelinya. Radikalisme adalah hasil labelisasi tentang gerakan-gerakan keagamaan yang memiliki ciri pembeda dengan gerakan Islam yang menjadi *meanstream* yang tujuannya adalah untuk menegakkan ajaran Islam sesuai dengan masa-masa lalu (*al-Salaf al-Shalih*). Visi misi gerakan ini adalah untuk menegakkan Islam sesuai dengan perintah Allah sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Tujuan akhir dari gerakan ini adalah terciptanya suatu tatanan masyarakat, seperti zaman Nabi Muhammad SAW, *khulafaur rasyidin*, dan *al-Salaf al-Shalih*. Untuk melakukan perubahan banyak dilakukan dengan cara menjebol tatanan yang sudah ada dan menggantinya dengan tatanan baru sesuai dengan yang diinginkannya.¹⁰⁴

Labelisasi inilah yang kemudian membawa implikasi lanjutan bahwa kekerasan atas nama agama menjadi absah. Padahal senyatanya, bahwa terorisme dengan terornya tetap teror bukan agama. Keduanya merupakan sesuatu yang berhubungan secara simetris. Keduanya tidak akan bertemu karena tujuan akhirnya sangat berbeda. Tujuan keselamatan tetaplah haruslah

¹⁰⁴ Nur Syam, *Radikalisme...*, 17.

menggunkan cara dan jalan keselamatan. Tujuan keselamatan tidak bisa diperoleh melalui cara-cara yang bertentangan dengan keselamatan. Jika teror bukan cara untuk keselamatan, sudah pasti bahwa teror bukan berkaitan dengan agama.¹⁰⁵

Di lain isu kerusuhan agama, fenomena lain yang mencoreng dunia pendidikan ialah maraknya kerusuhan antar pelajar di sejumlah daerah di tanah air. Jika ditelusuri, ada dua tipologi penjelasan. *Pertama*, adalah penjelasan radikalisme. Jika ditilik dari para pelaku pengeboman, mereka adalah kaum radikal Islam. Dinyatakan bahwa ada motif agama di dalam tindakan pengeboman tersebut, peristiwa Bali Blast, tanggal 12 Oktober 2002, adalah contoh nyata bagaimana beroperasinya sistem tindakan keagamaan yang menjadi variabel penjelasnya. Islam garis keras mengidentikkan tindakannya itu relevan dengan jihad agama. Merusak dan menghancurkan kepentingan barat adalah perintah agama.

Kedua, persoalan sosial-ekonomi-politik. Dalam kerusuhan agama di berbagai tempat, maka yang sesungguhnya menjadi cikal bakalnya adalah persoalan sosial-ekonomi-politik. Kecemburuan secara ekonomi kemudian dipadukan dengan masalah politik, yang juga dimuat masalah keagamaan dapat menjadi penjelas kerusuhan sosial agama dimaksud.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Nur Syam, *Rdikalisme...*, 20.

¹⁰⁶ Nur Syam, *Tantangan...*, 91.

Hal ini menunjukkan bahwa adanya tantangan yang sama yang dihadapi oleh dunia pendidikan dengan apa yang menjadi kendala tersemaikannya nilai-nilai multikultural dalam kehidupan bernegara yakni merebaknya radikalisme dan lemahnya konstitusi negara dalam mengelola keberagaman kita.

Dalam konteks keindonesiaan yang memang terdapat berbagai etnis, bahasa, dan keyakinan keagamaan di tengah multikulturalitas dan pluralitas tersebut, tentunya diperlukan aturan yang dapat dijadikan sebagai pedoman di dalam mengelola kebhinekaan yang memiliki potensi masalah.

B. Tantangan etnosentrisme dan *boutique multicultural*.

Multikulturalisme adalah seperangkat ide atau gagasan yang menghasilkan aliran yang berpandangan bahwa terdapat variasi budaya di dalam kehidupan masyarakat. Yang terjadi adalah adanya kesetaraan budaya, sehingga antara satu entitas budaya dengan budaya lainnya tidaklah berada di dalam suasana bertanding untuk memenangkan pertarungan.¹⁰⁷

Dalam konsep Islam, sejarah multicultural telah ada sejak zaman Rasulullah saw. Piagam Madinah merupakan suatu bukti bahwa secara substansif Rasulullah telah menerapkan konsep multiculturalisme dengan umat selain Islam. Dengan demikian, konsep multikulturalisme memang ada dalam Islam. Islam mengakui bahwa Tuhan telah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan mereka berbangsa-bangsa dan

¹⁰⁷ Nur Syam, *Tantangan...*, 79.

bersuku-suku supaya saling mengenal. Tuhan telah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasa dan warna kulit manusia, sebagai bukti bahwa Islam mengakui keragaman dimuka bumi.

Namun, kenyataan yang ada adalah ketidakmampuan manusia menerima perbedaan satu sama lain, sehingga memunculkan sikap saling mengunggulkan diri sendiri ataupun sekelompok entitas tertentu yang mengakibatkan adanya sekat yang semakin tajam didalam perbedaan itu sendiri. Sikap yang seperti itulah yang dimaksud dengan etnosentrisme.

Ironi, etnosentrisme itu masih dibumbuhi suasana *boutique multiculturalism* yang semakin memperparah komunikasi antar individu dengan individu lainnya atau antara individu dengan kelompok lain bahkan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain.

Suasana seperti itu harus segera ditindak dengan penanganan yang mengedepankan nilai-nilai multikultural, dicari akar permasalahannya dan solusinya. Salah satu sebabnya adalah merosotnya wawasan kebangsaan.

Di antara penyebabnya adalah keruntuhan orde baru yang di masa jayanya mengusung Pancasila yang ternyata gagal untuk menjadi *moral force* dalam menyelamatkan bangsa Indonesia dalam kancah pengembangan kesejahteraan masyarakat. Kegagalan itu dimaknai sebagai kegagalan negara dalam menjadikan Pancasila sebagai khazanah pengembangan negara modern berbasis kesejahteraan atau *social welfare*.

Kegundahan itu memang dirasakan oleh banyak kalangan. Makanya, diperlukan perbincangan tentang pentingnya menyegarkan kembali wawasan kebangsaan itu. Kegerahan tentang terkikisnya wawasan kebangsaan menjadi isu sentral di dalam konferensi tersebut. Ada pertanda polarisasi berbangsa yang ditandai dengan isu etnosentrisme yang berbasis etnis, ras, dan agama. Sementara itu, tantangan globalisasi sudah berada di pelupuk mata.

Dialog lintas agama memang sudah dilakukan. Kesepakatan untuk melakukan rekonsiliasi juga sudah terjadi. Perumusan kerjasama sudah diagendakan. Namun tampaknya masih sebatas upacara-upacara artifisial. Sebuah agenda besar yang belum tersentuh secara maksimal adalah meminimalisasi kecurigaan beragama. Posisi relasi antagonistik semestinya berubah menjadi posisi saling memahami. Pemahaman itu bukan dalam kerangka kesamaan teologis yang memang meniscayakan perbedaan mutlak, tetapi kesamaan humanitas yang meniscayakan adanya ruang saling bertemu.

Oleh karena itu, harmoni dan kerukunan hanya akan terjadi ketika komponen-komponen masyarakat beragama memahami arti pentingnya kebersamaan dalam humanitas melalui aksi di dalam kehidupan masyarakat yang berdasarkan *sunnatullah* memang plural dan multikultural.

Kiranya perlu mengembalikan permasalahan ini kepada al-Qur'an, menguraikan terlebih dahulu nilai-nilai penting yang terkandung dalam pendidikan multikultural. Yang dimaksud *nilai* disini adalah sifat-sifat yang penting bagi kemanusiaan dalam Islam yang perlu dikembangkan pada peserta

didik guna mencapai derajat manusia berbudaya dan masyarakat beradab sesuai tujuan pendidikan multikultural yang dimaksud. Nilai-nilai pendidikan multicultural dalam Islam diantaranya:

Pertama, Islam mengajarkan nilai kebersamaan, saling mengenal (*ta'aruf*) dalam perbedaan suku, bangsa, bahasa, warna kulit dan jenis kelamin pada peserta didiknya, serta mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antar sesama manusia. Hal ini tercermin dalam firman Allah swt :
“*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antar kamu dis sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu*” (QS. Al-Hujurat: 13). Ayat lain menyatakan: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui” (QS. Ar-Rum : 22).

Kedua, Islam mengajarkan untuk bersikap lemah lembut kepada orang lain yang berlainan agama, berlainan bangsa, berlainan suku dan lain-lainnya. Serta memaafkan mereka ketika bersalah, memohonkan ampunan bagi mereka, dan bermusyawarah dengan mereka demi tegaknya kehidupan demokrasi. Ayat itu berbunyi: “*Maka disebabkan rahmat Allah, kamu berlaku lemah lembut kepada mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, tentu mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi*

mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu". (QS. Ali Imron : 159)

Ketiga, Islam mengajarkan bahwa semua manusia adalah makhluk yang mempunyai "kesatuan social", yang dalam ayat al-Qur'an disebutkan : *"Sesungguhnya umat ini adalah umatmu, umat yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku"* (QS. Al-Anbiya : 92) Dalam ayat lain: *"Sesungguhnya seluruh manusia adalah umat yang satu"* (QS. Al-Baqarah : 213). Sebagai makhluk yang mempunyai kesatuan social, maka diharapkan selalu bekerjasama social, melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, serta tidak saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Dijelaskan dalam firman Allah swt: *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kamu sekalian kepada Allah"*(QS. Al-Maidah : 2).

Keempat, Islam mengajarkan sikap toleransi dan kebebasan berfikir, tidak ada pemaksaan terhadap memilih salah satu agama. Firman Allah swt: *"Tidak ada paksaan untuk memasuki agama. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah"*(QS. AL-Baqarah : 256). Begitu juga dalam firman Allah swt disebutkan: *"Bagimu agamamu, dan bagiku agamaku"*(QS. AL-Kafiruun : 6). Dalam ayat lain: *"Apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semua?"* (QS. Yunus: 99).

Kelima, Islam mengajarkan agar umat manusia saling menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, sehingga terbina kerukunan dan perdamaian yang hakiki. Islam tidak membenarkan adanya perselisihan apalagi pertengkaran antara pemeluk agama yang berbeda. Penegasan ini terdapat dalam firman Allah swt: *“Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami, amal-amal kami dan bagi kamu, amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nya lah (kita) kembali”*(QS. Asy-Syura: 15)

Keenam, Islam mengajarkan untuk bergerak maju (progresif), serta memberantas kebekuan/kejumudan (statis) dan selalu mengembangkan sikap kelenturan (dinamis). Mengenai hal ini, Allah swt telah berfirman: *“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”*(QS. Ar-Ra’du: 11). Tentang pemberantasan sikap kebekuan (statis) tercermin dalam firman Allah swt yang berbunyi: *“Apakah dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti kepada apa yang diturunkan Allah kepada Rasul. Mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengajarkannya. Apakah mereka mengikuti nenek moyang mereka, walau nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk”*(QS. Al-Maidah 104).

Ketujuh, Islam mengajarkan persaudaraan anggota masyarakat yang beriman dengan segala keragaman. Baik persaudaraan internal umat beragama, maupun eksternal umat beragama. Tentang persaudaraan ini tercermin dalam firman Allah swt: “*Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara*” (QS. Al- Hujurat: 10). Ayat lain menyatakan: “... *Sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain...*” (QS. Ali Imran: 195). Begitu juga dalam sabda Nabi Muhammad saw: “...*Orang Islam adalah saudara orang Islam yang lain*” (HR. Bukhori Muslim) dan hadist yang berbunyi: “...*Jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara*” (HR. Bukhori Muslim).

Kedelapan, Islam mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, tidak memperbolehkan berbuat aniaya, semena-mena, menindas dan bersikap diskriminatif terhadap manusia, agama, suku, bangsa atau kaum lainnya. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah swt: “...*Kamu (tidak) boleh menganiaya, dan tidak pula dianiaya*” [36]. Tidak pula membolehkan menghina dan memandang rendah suatu kaum yang tidak berkeyakinan seperti kita, yang dijelaskan dalam firman-Nya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum menghina kaum yang lain (karena) boleh jadi, mereka (yang dihina) lebih baik daripada mereka (yang menghina) dan janganlah pula wanita-wanita (menghina) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang dihina) lebih baik daripada wanita-wanita (yang menghina)*” (QS. Al-Baqarah: 279).

Kesembilan, Islam mengajarkan sikap mengedepankan musyawarah dalam mengambil sebuah keputusan untuk kepentingan bersama, berbangsa, bernegara atau urusan duniawi lainnya. Sehingga dengan demikian, akan timbul sikap inklusif (terbuka) yang menjadi bagian dari cita-cita pendidikan multicultural di masyarakat yang plural. Hal ini dipertegas dalam firman Allah swt: “... *Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka (sebelum melaksanakan kehendak)*” (QS. Al-Hujurat:11). Dalam ayat lain disebutkan: “... *dan bermusyawarahlah dalam urusan itu (duniawi)*”.(QS. Asy-Syura: 38). Dengan mengedepankan musyawarah, peserta didik akan belajar bersikap terbuka (inklusif) dalam segala bentuk keragaman yang ada.

Kesepuluh, Islam mengajarkan apabila ada persoalan agama dengan agama lain, atau semacamnya, agar berdebat dengan cara yang baik (*mujadalah bil ahsan*). Islam tidak memperkenankan perdebatan dengan cara yang ekstrim, curang atau yang semacamnya, sehingga dapat mengakibatkan renggangnya keberagaman antar sesama. Hal ini tercermin dalam firman Allah swt: “*Dan janganlah berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang paling baik*” (QS. Ali Imran: 159). Dalam ayat lain disebutkan: “... *Dan debatlah mereka dengan cara yang paling baik...* ” (QS. al-Ankabut: 46).

Kesebelas, Islam mengajarkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan (*fastabiqul khairat*) baik internal umat beragama, atau eksternal umat beragama. Islam tidak mengajarkan sikap ekstrim, jika suatu misal pada perlombaan di era global tersebut kalah dalam hal teknologi dengan umat lain.

Kesadaran rendah hati dan selalu belajar dari internal, maupun eksternal umat beragama harus ditanamkan, agar dalam perlombaan di era global ini meraih kemenangan secara wajar. Dasar perlombaan ini disebutkan dalam firman Allah swt: *“Bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kalian (dalam membuat) kebaikan. Dimana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”*. (QS. An-Nahl: 125).

Kedua belas, Islam mengajarkan agar selalu selalu menciptakan perbaikan-perbaikan pada negerinya (nilai-nilai luhur sebuah bangsa). Perbaikan itu bisa dilakukan dengan jalan menggalang perdamaian lintas agama, suku, etnis dan budaya. Sebab binasanya sebuah negeri merupakan tanggung jawab penduduk negeri itu sendiri dalam berbuat kebaikan dalam negeri tersebut. Firman Allah swt: *“Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedang penduduk-penduduknya berbuat kebaikan”* (QS. al-Baqarah : 148).

Ketiga belas, Islam mengajarkan manusia untuk menjadi penegak keadilan. Menegakkan keadilan (kebenaran) terhadap dirinya sendiri maupun orang lain, mulai dari sanak kerabat hingga orang lain yang berbeda suku, bangsa, agama, budaya, dan lainnya tanpa pandang bulu. Firman Allah swt: *“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan (kebenaran)...”* (QS. an-Nisa:135).

Sebenarnya nilai-nilai selain diatas masih sangat banyak sekali dan tidak terbatas. Namun ketiga belas nilai-nilai dari al-Qur'an diatas kiranya sudah mewakili bahwa Islam mengajarkan sikap toleran, bersikap inklusif terhadap komunitas sesama Islam sendiri maupun selain Islam. Artinya, sikap-sikap dalam multicultural adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari oleh semua manusia yang ada di bumi ini, tak terkecuali bagi umat Islam sendiri. Keberagaman adalah sebuah keniscayaan *Sunnah Allah* yang seharusnya bisa disikapi dengan arif bijaksana.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tantangan etnosentrisme dan *boutique multiculturalism* tidak boleh dianggap sebelah mata karena dapat memecah belah persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara. Serta menjadi batu penghalang tersemaikannya nilai-nilai multikultural dalam dunia pendidikan, yang mana konsumennya adalah generasi masa depan.